



LAPORAN KEUANGAN AUDITED SEMESTER II DAN TAHUNAN TA 2021 (PER 31 DESEMBER 2021)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA BARAT
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWA



Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwakarta

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021

Jalan Siliwangi No. 9 Kel. Nagri Kidul, Purwakarta 41111
Telp. 0264-8304884, 8227888 Faks. 0264-8225765

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwakarta adalah salah satu entitas pelaporan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwakarta *Audited* Semester II dan Tahunan Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan *Audited* Semester II dan Tahunan Tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwakarta. Disamping itu laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Purwakarta, 13 Mei 2022
Ketua Pengguna Anggaran



Wahid Prajogo

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan Atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran	20
C. Penjelasan Atas Pos-pos Neraca	29
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	45
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	51
F. Pengungkapan Penting Lainnya	53
VI. Lampiran dan Daftar	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan *Audited* Semester II dan Tahunan Tahun 2021 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwakarta yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Purwakarta, 13 Mei 2022

Mengetahui,

Kepala Pengguna Anggaran



Wahjudi Prajogo

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwakarta Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan pemerintahan, Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 11.056.838.762,- atau mencapai 89 % dari Estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 12.372.815.000,-.

Realisasi Belanja Negara pada Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp 1.673.691.420,- atau mencapai 95 % dari alokasi anggaran sebesar Rp 1.757.479.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021. Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp 29.536.634.250,63,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp 1.233.694.679,63,-. Aset Tetap sebesar Rp 28.302.939.571,-; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp 0,- dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 0,-.

Nilai Kewajiban dan *Ekuitas* masing-masing sebesar Rp 1.184.754.354,63,- dan Rp 28.351.879.896,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 11.025.232.636,-, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 2.107.386.207,- sehingga terdapat surplus/ (defisit) dari kegiatan Operasional senilai Rp 8.917.846.429,- Kegiatan Non-Operasional dan Pos-pos Luar Biasa masing-masing surplus/ (defisit) sebesar Rp 64.941.899,- dan surplus/ (defisit) sebesar Rp 0 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp 8.982.788.328,-

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp 28.752.238.910,- dikurangi surplus-LO sebesar Rp 8.982.788.328,- kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp 0,- dan ditambah transaksi antar entitas sebesar (Rp 4.343.975.104),- sehingga ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp 28.351.879.896.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas, sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021 Dan 31 Desember 2020

Uraian	Catatan	Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021			Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2020
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi thdp Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	12.372.815.000	11.056.838.762	89	8.166.938.099
Jumlah Pendapatan		12.372.815.000	11.056.838.762	89	8.166.938.099
BELANJA	B.2				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	0	0	#DIV/0!	1.246.586.955
Belanja Barang	B.4	1.718.055.000	1.634.267.420	95	1.693.951.921
Belanja Bantuan Sosial	B.5	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Operasi		1.718.055.000	1.634.267.420	95	2.940.538.876
Belanja Modal					
Belanja Tanah	B.6	0	0	0,00	0
Belanja Peralatan dan Mesin	B.7	39.424.000	39.424.000	100	505.397.500
Belanja Gedung dan Bangunan	B.8	0	0	100	0
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.9	0	0	0,00	0,00
Belanja Modal Lainnya	B.10	0	0	0,00	0
Jumlah Belanja Modal		39.424.000	39.424.000	100	505.397.500
Jumlah Belanja		1.757.479.000	1.673.691.420	95	3.445.936.376

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

II. NERACA

Neraca Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	6.150.000	600.000
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	1.184.754.355	82.613.602
Piutang Bukan Pajak	C.4	0	0
Bagian Lancar TP/TGR	C.5		
Pendapatan yang masih harus diterima	C.6	27.785.773	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	C.7		
Belanja Dibayar Dimuka	C.8	0	0
Persediaan	C.9	15.004.552	17.213.202
Persediaan Belum diregister		0,00	0,00
Jumlah Aset Lancar		1.233.694.679,63	100.426.804
Piutang Jangka Panjang			
Tagihan TP/TGR	C.10		
Tagihan Penjualan Angsuran	C.11	0.00	0.00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	C.12		
Jumlah Piutang Jangka Panjang		0	0
Aset Tetap			
Tanah	C.13	20.819.298.000	20.819.298.000
Peralatan dan Mesin	C.14	5.064.505.863	5.126.331.863
Gedung dan Bangunan	C.15	7.604.879.500	7.604.879.500
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.16	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.17	13.922.600	0
KDP	C.18	0	0
Akumulasi Penyusutan	C.19	(5.199.666.392)	(4.813.042.446)
Jumlah Aset Tetap		28.302.939.571	28.737.466.917
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.20	0	0
Aset Lain-lain	C.21	944.223.588	958.146.188
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.22	(944.223.588)	(944.223.588)
Jumlah Aset Lainnya			
JUMLAH ASET		29.536.634.250,63	28.851.816.321
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Uang Muka dari KPPN	C.23	0	0
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.24	1.184.754.354,63	99.577.411
Pendapatan Diterima Dimuka	C.25	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1.184.754.354,63	99.577.411
JUMLAH KEWAJIBAN		1.184.754.354,63	99.577.411
EKUITAS			
Ekuitas	C.26	28.351.879.896	28.752.238.910
JUMLAH EKUITAS		28.351.879.896	28.752.238.910
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		29.536.634.250,63	28.851.816.321

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

III. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	11.025.232.636	8.167.423.585
Jumlah Pendapatan		11.025.232.636	8.167.423.585
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	0	1.231.144.805
Beban Persediaan	D.3	82.064.050	141.852.858
Beban Jasa	D.4	1.074.584.459	1.054.964.988
Beban Pemeliharaan	D.5	351.158.252	397.013.911
Beban Perjalanan Dinas	D.6	111.705.500	137.597.600
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial	D.8	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	487.873.946	490.317.880
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	D.10	0	
Beban Lain-lain	D.11	0	0
Jumlah Beban		2.107.386.207	3.452.892.042
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		8.917.846.429	4.714.531.543
Kegiatan Non Operasional	D.12		
Surplus (Defisit) dari kegiatan non operasional lainnya		936.900	117.514
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya		945.900	117.514
Beban dari Kegiatan Non Operasional lainnya		9000	0
Surplus (Defisit) dari kegiatan non operasional		64.941.899	(808.176)
Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa		8.982.788.328	4.713.723.367
Pos Luar Biasa	D.13		
Pendapatan PNPB		0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas		0,00	0,00
Beban Persediaan		0,00	0,00
Surplus/Defisit LO		8.982.788.328	4.713.723.367

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Laporan Perubahan Ekuitas
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020*

Uraian	Tahun Berjalan	Pembanding
Ekuitas Awal	28.752.238.910	28.602498.060
Surlus/Defisit LO	8.982.788.328	4.713.723.367
Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan		
- Penyesuaian Nilai Aset	-	-
- Penyesuaian Nilai Kewajiban	-	-
Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar		
Koreksi yang menambah/ mengurangi ekuitas	-	(27.532.450)
- Koreksi nilai persediaan	-	-
- Selisih Revaluasi aset tetap	-	(33.180.000)
- Koreksi nilai aset tetap non revaluasi	-	5.647.550
- Koreksi atas pendapatan	-	-
- Koreksi lain-lain	-	-
Jumlah lain-lain		
Transaksi antar entitas	(9.383.147.342)	(4.536.450.067)
Kenaikan/ Penurunan Ekuitas	(400.359.014)	149.740.850
Ekuitas akhir	28.351.879.896	28.752.238.910

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar
Hukum

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas PMK Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan BMN berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
9. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2012 tentang tentang Penatausahaan Hasil Pengurusan Piutang dan Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Informasi Akrua Pada Laporan Keuangan.
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
12. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-9180/PB/2015 tanggal 30 Oktober 2015.

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwakarta

Dasar

Hukum

Entitas dan

Rencana

Strategis

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan PMK 170/PMK.01/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 9, Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Purwakarta mempunyai tugas dan fungsi dalam pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Purwakarta diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan kualitasnya yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

- Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta berkomitmen dengan visi “Menjadi Pengelola Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang yang profesional dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:
- Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara;
- Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
- Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
- Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, akuntabel;
- Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pendekatan

Penyusunan

Laporan

Keuangan

Laporan Keuangan Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwakarta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan

dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4 Basis Akuntansi

Basis
Akuntansi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwakarta menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5 Dasar Pengukuran

Dasar
Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwakarta dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah

A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan – LRA

Pendapatan - LRA

- Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.
- Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah sebagai berikut :
 - Penerimaan Bea Lelang Penjual dan Pembeli atas lelang non eksekusi oleh Pejabat Lelang Kelas II. Pendapatan diakui ketika terdapat penyetoran ke Kas Negara;
 - Penerimaan atas Kertas Sekuriti Untuk Pembuatan Kutipan Risalah Lelang bagi Pejabat Lelang Kelas II. Pendapatan diakui ketika

terdapat penyetoran ke Kas Negara. Pendapatan diakui ketika terdapat penyetoran ke Kas Negara;

- Penerimaan Bea Lelang Penjual dan Pembeli atas Lelang Pegadaian. Pendapatan diakui ketika terdapat penyetoran ke Kas Negara;
- Penerimaan atas Pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II. Pendapatan diakui ketika terdapat penyetoran ke Kas Negara
- Penerimaan Pemberian Izin Operasional Balai Lelang. Pendapatan diakui ketika sudah terbitnya SK dan sudah disetor ke Kas Negara;
- Penerimaan atas Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Lelang Kelas II. Pendapatan diakui ketika izin perpanjangan telah terbit dan sudah disetor ke Kas Negara;
- Penerimaan Denda Keterlambatan Penyetoran Bea Lelang Ke Kas Negara oleh Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas II. Pendapatan diakui ketika diketahui bahwa Pejabat Lelang Kelas II atau Balai Lelang terlambat menyetorkan Bea Lelang. Hal ini diketahui setelah dilakukan verifikasi laporan Balai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II oleh Kanwil DJKN;
- Penerimaan Bea Lelang Batal Atas Permintaan Penjual. Pendapatan diakui pada saat diterimanya surat pemberitahuan pembatalan dari penjual oleh Kepala KPKNL dan disetor ke Rekening Penampungan Lelang KPKNL ;
- Penerimaan Bea Lelang Penjual dan Pembeli atas lelang eksekusi, non eksekusi oleh Pejabat Lelang Kelas I, dan lelang kayu hasil hutan lainnya dari tangan pertama. Pendapatan diakui pada saat pembeli melunasi pembayaran Pokok Lelang ke Rekening Penampungan Lelang KPKNL. ;
- Penerimaan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara dari Penanggung Hutang Pendapatan diakui pada saat telah pastinya pembayaran angsuran atau penarikan yang dindikasikan oleh telah diterimanya pembayaran oleh Bendahara Penerima atau telah masuk ke dalam rekening Bendahara Penerima dan telah terverifikasi.;
- Penerimaan Uang Jaminan Penawaran Lelang dari Pembeli Wanprestasi. Pendapatan diakui pada saat telah ditetapkannya Pembeli Lelang wanprestasi oleh Pejabat Lelang;
- Penerimaan atas Uang Jaminan Penawaran Lelang Yang Tidak Diambil. Pendapatan diakui 6 bulan setelah upaya pemberitahuan

- melalui surat panggilan/pengumuman melalui surat kabar harian kepada pemilik uang jaminan dan telah disetor ke Kas Negara;
- Penerimaan Kelebihan Hasil Bersih Lelang PUPN yang Tidak Diambil oleh Penanggung Hutang dan/ atau Penjamin Hutang. Pendapatan diakui setelah 3 (tiga) kali dipanggil secara patut tidak bersedia mengambil uang kelebihan hasil lelang atau telah dipanggil melalui koran dan telah disetor ke Kas Negara;
 - Penerimaan Pemohon Lelang Tidak Bersedia Mengambil/ Mencairkan Cek/BG Menerima Hasil Bersih Lelang. Pendapatan diakui saat pemberitahuan tertulis telah dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 kali dan telah disetor ke Kas Negara.;
 - Penyetoran atas Penerimaan Piutang Negara Yang Tidak Jelas. Pendapatan diakui setelah Proses verifikasi dan konfirmasi dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak penerimaan tersebut masuk ke Rekening Penampungan Piutang dan telah disetorkan ke Kas Negara.
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya

klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban ; terjadinya konsumsi aset ; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Kebijakan Akuntansi atas Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

b. Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :
 - (a). Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, serta peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - (b). Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 25.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - (c). Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Piutang
Jangka
Panjang

c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan (TP) adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.
- TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

Aset
Lainnya

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi *software* komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.
- Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan

sebagai Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi, Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

(6) Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/ DJKN	100%

(9) Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset tetap pada Entitas Pemerintah Pusat dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.6/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, kebijakan akuntansi atas aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2005 mengalami perubahan, yang semula dilakukan penyusutan sejak tanggal perolehan menjadi dilakukan penyusutan sejak semester II tahun 2010 sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap dimaksud.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel

Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji dalam tabel berikut.

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua Pertama Kali

Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis Akrua
Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama. Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakantahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan
Negara dan Hibah
Rp11.056.838.762

B.1 Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp11.056.838.762,- atau mencapai 89 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp12.372.815.000,-. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah DJKN adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi Pendapatan dan realisasi PNBP lainnya sampai dengan tanggal pelaporan dapat dilihat dalam Tabel berikut ini:

**Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBP
Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021**

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	-	-	-
2	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	64.004.999	-
3	Pendapatan Jasa Lainnya	-	-	-
4	Pendapatan Bea Lelang pejabat Lelang Kelas I	11.119.000.000	8.942.594.543	80.43
5	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	1.242.000.000	1.955.724.740	157.47
6	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	11.815.000	7.590.195	64.24
7	Pendapatan Lain-Lain	-	80.752.385	-
8	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	936.900	
9	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	
10	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak diambil oleh Yang Berhak	-	-	-
11	Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	-	-
	Jumlah	12.372.815,000	11.056.838.762	89.36

Realisasi PNBP Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp 2.889.900.663,- atau 35,39% dari realisasi Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2020. Kenaikan tersebut disebabkan adanya kenaikan PNBP biaya administrasi pengurusan piutang negara dan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I.

Perbandingan realisasi PNBP Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 dan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Perbandingan Realisasi PNPB
Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 Dan Semester II dan
Tahunan Tahun Anggaran 2020**

No.	Uraian	Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021	Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2020	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	5.235.000	4.587.000	648.000	12,37
2	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	64.004.999	-	64.004.999	-
3	Pendapatan Jasa Lainnya	80.752.385	61.524.308	80.752.385	(23,81)
4	Pendapatan Bea Lelang pejabat Lelang Kelas I	8.942.594.543	7.242.379.861	1.700.214.682	19,01
5	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	1.955.724.740	755.972.692	715.936.208	63,56
6	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	7.590.195	102.359.724	(94.769.529)	(92,58)
7	Pendapatan Lain-Lain	-	-	-	-
8	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	936.900	114.514	822.386	87,78
9	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-	-
10	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak diambil oleh Yang Berhak	-	-	-	-
11	Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	-	-	-
	Jumlah	11.056.838.762	8.166.938.099	(2,889.900.663)	(26,13)

B.2. Belanja

Realisasi Belanja
Negara Rp
5,413,862,019,-

Realisasi belanja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwakarta per kegiatan yang dilaksanakan pada Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

**Anggaran dan Realisasi Belanja Neto per Kegiatan
Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021**

Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi Belanja (Rp)	% Real thd Angg
4796	Komunikasi, Edukasi dan Standardisasi	5.560,000	3.784.000	68.06
4797	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	109,000	0	0.00
4798	Pengelolaan Aset	119.298.000	112.229.000	94.07
4700	Legislasi dan Ligitasi	9.292,000	8.504.500	91.52

Laporan Keuangan Audited Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwakarta Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021

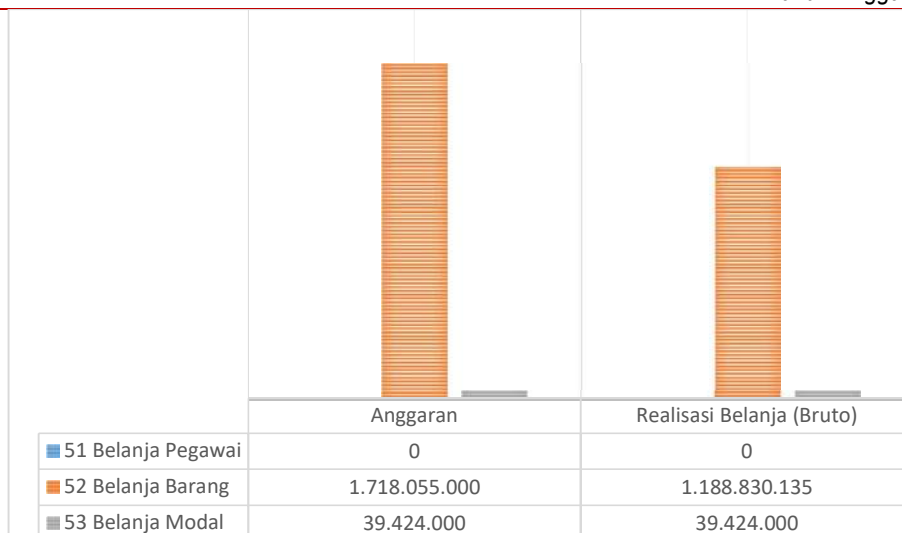
4701	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	1.617.360.000	1.545.373.920	95.55
4702	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	3.860.000	2.240.000	58.03
4704	Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal I	2.000.000	1.560.000	78.00
Jumlah		1.757.479.000	1.673.691.420	95.23

Realisasi belanja *Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwakarta pada Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021* adalah sebesar Rp 1.673.691.420,- atau sebesar 95 persen dari anggarannya setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp 0,- Anggaran belanja *Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwakarta Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021* adalah sebesar Rp1.757.479.000,-. Anggaran dan realisasi belanja *Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021* dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021

<i>Kode Jenis Belanja</i>	<i>Uraian Jenis Belanja</i>	<i>Anggaran</i>	<i>Realisasi Belanja</i>	<i>%</i>
51	<i>Belanja Pegawai</i>	0	0	#DIV/0!
52	<i>Belanja Barang</i>	1.718.055.000	1.634.267.420	95
53	<i>Belanja Modal</i>	39.424.000	39.424.000	100
	<i>Total Belanja Kotor</i>	1.757.479.000	1.673.691.420	95
	<i>Pengembalian</i>	0	0	0
	<i>Total Belanja Netto</i>	1.757.479.000	1.673.691.420	95

Komposisi anggaran dan realisasi belanja Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada grafik berikut :



Realisasi belanja Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar Rp(1.772.244.956),- atau (51) % dibandingkan periode Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2020. Perbandingan realisasi belanja Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 dan Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Perbandingan Realisasi Belanja
Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 dan Semester II dan
Tahunan Tahun Anggaran 2020**

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Naik/(Turun)	
		Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021	Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2020	Rp	%
51	Belanja Pegawai	0	1.246.586.955	(1.246.586.955)	(100)
52	Belanja Barang	1.634.267.420	1.693.951.921	(59.684.501)	(4)
53	Belanja Modal	39.424.000	505.397.500	(465.973.500)	(92)
	Jumlah	1.673.691.420	3.445.936.376	(1.772.244.956)	(51)

B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp0

Belanja Pegawai adalah pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang diperkerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dikerjakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwakarta pada Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan PNS; Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS; Belanja Honorarium; dan Belanja Lembur.

Realisasi belanja pegawai Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 dan Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp 1.246.586.955,- Realisasi belanja pegawai Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar (100) persen bila dibandingkan dengan periode Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2020. Rincian belanja pegawai dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Perbandingan Belanja Pegawai
Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 dan Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2020

Uraian	Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2020 (Rp)	Naik/ (Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	0	895.605.100	(895.605.100)	(100)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	12.960	(12.960)	(100)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	62.019.480	(62.019.480)	(100)
Belanja Tunj. Anak PNS	0	20.976.346	(20.976.346)	(100)
Belanja Tunj. Struktural PNS	0	31.680.000	(31.680.000)	(100)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	12.600.000	(12.600.000)	(100)
Belanja Tunj. PPh PNS	0	318.510	(318.510)	(100)
Belanja Tunj. Beras PNS	0	44.610.720	(44.610.720)	(100)
Belanja Uang Makan PNS	0	143.924.000	(143.924.000)	(100)
Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS dalam dan luar negeri	0	0	0	0.00
Belanja Tunj. Umum PNS	0	35,210,000	(35,210,000)	(100)
Belanja Uang Lembur	0	0	0	0
Realisasi Belanja Bruto	0	1.246.957.116	(1.246.957.116)	(100)
Pengembalian Belanja	0	370.161	(370.161)	-
Realisasi Belanja Netto	0	1.246.586.955	(1.246.586.955)	(100)

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp1.634.267.420

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang

dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

Realisasi Belanja Barang Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 dan Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.634.267.420,- dan Rp1.693.951.921,-. Realisasi belanja barang Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 mengalami kenaikan sebesar (4) persen bila dibandingkan dengan Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2020. Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Perbandingan Belanja Barang
Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 dan Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2020

Uraian	Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021	Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2020	Naik/ (Turun)	%
Belanja Keperluan Perkantoran	607.600.350	595.894.846	11.705.504	1,92
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	-	-	-	-
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	14.614.400	18.472.000	(3.857.600)	(20,88)
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	165.822.000	186.960.000	(21.138.000)	(11,30)
Belanja Barang Operasional Lainnya	8.400.000	-	8.400.000	-
Belanja Barang Operasional – Pen Covid19	71.139.448	80.805.463	(9.666.015)	(11,96)
Belanja Bahan	4.663.000	13.805.500	4.663.000	-
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	39.600.000	-	-	-
Belanja Honor Output Kegiatan	-	-	-	-
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	79.855.400	106.966.630	(27.111.230)	(25,34)
Belanja Langganan Listrik	145.015.670	140.780.921	4.234.749	2,92
Belanja Langganan Telepon	34.756.400	13.903.450	21.662.950	62,32
Belanja Langganan Air	788.000	701.600	86.400	10,96
Belanja Jasa Penanganan Pandemi Covid 19	9.149.000	1.050.000	8.099.000	88,52
Belanja Jasa Konsultan	-	-	-	-
Belanja Sewa	-	-	-	-
Belanja Jasa Profesi	-	-	-	-
Belanja Jasa Lainnya	-	-	-	-
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	177.152.589	217.901.373	(40.748.784)	(18,70)
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	174.005.663	179.112.538	(5.106.875)	(2,85)
Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan	-	-	-	-

Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya	-	-	-	-
Belanja Perjalanan Biasa	98.105.500	119.497.600	(21.392.100)	(17,90)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.600.000	18.100,000	4.500,000)	24,86
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	-	-	-
Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	-	-	-	-
Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	-	-	-	-
Total Belanja Barang Netto	1.634.267.420	1.693.951.921	(59.684.501)	(3,52)

Belanja Modal
Rp39.424.000

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.

Realisasi Belanja Modal Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 dan Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 39.424.000,- dan Rp 505.397.500,-. Realisasi belanja modal Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 mengalami Penurunan, hal ini disebabkan tidak ada kegiatan yang terlalu membutuhkan biaya belanja modal dibandingkan tahun sebelumnya. Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 dan Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2020

Uraian	Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021	Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2020	Naik/ (Turun)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.424.000	505.397.500	(465.973.500)	(92)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	-	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya	-	-	-	-

Belanja Modal Jaringan	-	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-	-
Total Belanja Modal Kotor	39.424.000	505.397.500	(465.973.500)	(92)
Total Pengembalian Belanja Modal	-	-	-	-
Total Belanja Modal Netto	39.424.000	505.397.500	(465.973.500)	(92)

B.6 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 dan Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0

Belanja Modal
Tanah Rp0

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 dan Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2020

URAIAN JENIS BELANJA	SMT II TA 2021	SMT II TA 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Bersih	0	0	0,00

B.7 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 dan Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 39.424.000,- dan Rp 505.397.500,-
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar 92,20 % persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2020, karena menyesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin Rp
39.424.000,-

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan & Mesin Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 dan Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2020

Uraian	Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021	Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2020	Naik/ (Turun)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.424.000	505.397.500	(465.973.500)	(92.20)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	-	-	-	-

Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya	-	-	-	-
Belanja Modal Jaringan	-	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-	-
Total Belanja Modal Kotor	39.424.000	505.397.500	(465.973.500)	(92.20)
Total Pengembalian Belanja Modal	-	-	-	-
Total Belanja Modal Netto	39.424.000	505.397.500	(465.973.500)	(92.20)

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp0

B.8 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 dan Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp0,-.

Kenaikan realiasi belanja modal gedung dan bangunan Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 dibandingkan Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2020.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung & Bangunan Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 dan Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2020

URAIAN JENIS BELANJA	Semester I TA 2020	Semester I TA 2019	Naik (Turun) %
- Renovasi Ruang Serbaguna	0	0	0,00
- Rehabilitasi Rumah dinas dan penataan halaman	0	0	
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Bersih	0	0	0,00

Belanja Modal
Jalan, Irigasi dan
Jaringan Rp0

B.9 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 dan Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Kenaikan realiasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 dibandingkan Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2020.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 dan Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2020

URAIAN JENIS BELANJA	SMT II TA 2021	SMT II TA 2020	Naik (Turun) %
-	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Bersih	0	0	0,00

Belanja Modal
Lainnya Rp0

B.10 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 dan Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Kenaikan realiasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 dibandingkan Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2020

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 dan Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2020

URAIAN JENIS BELANJA	SMT II TA 2021	SMT II TA 2020	Naik (Turun) %
Aset Tak Berwujud	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Bersih	0	0	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

Aset Lancar

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 1.233.694.679,63 dan Rp 100.426.804,-.

Rincian Aset Lancar pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwakarta per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ Penurunan
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	
2	Kas di Bendahara Penerimaan	6.150.000	600.000	5.550.000

3	Kas Lainnya dan Setara Kas	1.184.754.355	82.613.602	1.102.140.753
4	Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	0	0	0
5	Piutang Bukan Pajak (Netto)	0	0	0
6	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	-	-	-
7	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	-	-	-
8	Persediaan	15.004.552	17.213.202	(2.208.650)
	Jumlah	1.233.694.679,63	100.426.804	1.133.267.875,63

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal dari dana kas kecil (UP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetor kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	TW III TA 2021	SMT II TA 2020	Keterangan
Bank BJB Syariah No Acc 5020108000040	-	-	PS TKPKN
Bank BRI No Acc 0075001000513301	-	-	Uang Persediaan
Uang Tunai	-	-	
Kuitansi belum dipertanggungjawabkan	-	-	
	-	-	

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp6.150.000,-

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp6.150.000,- dan Rp600.000,-. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak .

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Bank BNI No. Acc 5455556666 - RPL Lelang	6.150.000	80.357.260
Bank BNI No. Acc 4133334444 - RPL PN	-	2.136.342
Uang Tunai	-	-
	6.150.000	82.493.602

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas Bendahara Penerimaan

Kas Lainnya
dan Setara Kas
Rp1.184.754.35
5

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan dana yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan di lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwakarta berupa Dana Pihak Ketiga dan Dana yang masih dalam konfirmasi ke Bank.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp 1.184.754.355,- dan Rp 82.613.602,- yang merupakan kas berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Jasa Giro yang belum disetor ke Kas Negara	-	-
Pajak PPh yang belum disetor	-	-
Honor Kegiatan yang belum dibagikan	-	-
Dana Pihak ketiga	1.184.754.355	82.613.602
	1.184.754.355	82.613.602

C.4 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan
Pajak Rp0

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal neraca.

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Piutang PNBP	27.785.773	-
Piutang Lainnya	-	-
	27.785.773	-

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

BL Tagihan
TP/TGR Rp0,-

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- yang merupakan hak atau klaim terhadap pihak lain yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR

		NIHIL	

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

BL Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0,00.

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Bagian Lancar TPA merupakan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Bagian Lancar TPA

No	Nama	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Nihil	0,00	0,00
2			
Jumlah		0,00	0,00

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Jangka
Pendek Rp-

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak

Tertagih – Piutang Jangka Pendek pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar		0,50%	-
Kurang Lancar		10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar		10%	-
Diragukan		50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar		0,50%	-
Kurang Lancar		10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

C.8 Belanja Dibayar Dimuka

*Belanja Dibayar
dimuka Rp0*

Saldo Belanja Dibayar di Muka (*prepaid*) per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp 0,- dan Rp0,-. Belanja dibayar dimuka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut :

Rincian Belanja Dibayar di Muka

Jenis	SMT II 2021	SMT II 2020
Penerimaan Kembali Belanja	0	0
Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0
Jumlah	0	0

C.9 Persediaan

*Persediaan
Rp15.004.552*

Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp15.004.552,- dan Rp17.213.202,-. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Persediaan

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Barang Konsumsi	15.004.552	17.213.202
Bahan untuk Pemeliharaan	0	0
Suku Cadang	0	0
Pita Cukai Materai dan Leges	0	0
ATL untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	0
Bahan Baku	0	0
Persediaan Lainnya	0	0
Jumlah	15.004.552	17.213.202

Keterangan :

- Persediaan senilai Rp- dalam kondisi rusak;
- Persediaan senilai Rp- dalam kondisi usang.

C.10 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan
Rp-

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada Bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan Bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Tagihan TP/TGR

No.	Debitur	31 Des 2021	31 Des 2020
1	NIHIL	-	-
2			
	Jumlah		

C.11 Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

TPA Rp0,00

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual beli aset tetap instansi.

Rincian Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut :

Rincian Tagihan TPA

No.	Debitur	31 Des 2021	31 Des 2020
1	Nihil	-	-
	Jumlah	-	-

C.12 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang Rp -

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TPA.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut :

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10,00%	-
Diragukan	-	50,00%	-
Macet	-	100,00%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	0,50%	-
Kurang Lancar	-	10,00%	-
Diragukan	-	50,00%	-
Macet	-	100,00%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Aset Tetap

Saldo aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 tersaji sebesar Rp28.302.939.571,- dan Rp28.737.466.917,- yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam

kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap Direktorat Jenderal Kekayaan Negara per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tetap

No	Jenis	Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021	Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2020
1	Tanah	20.819.298.000	20.819.298.000
2	Peralatan dan Mesin	5.064.505.863	5.126.331.863
3	Gedung dan Bangunan	7.604.879.500	7.604.879.500
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	13.922.600	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0
Jumlah Aset Tetap		33.488.683.368	33.550.509.363
Akumulasi Penyusutan		(5.199.666.392)	(4.813.042.446)
Nilai Buku Aset Tetap		28.302.939.571	28.737.466.917

Tanah

Rp20.819.298.000

00

C.13 Tanah

Pada tahun 2017 dan 2018 telah dilakukan Revaluasi Barang Milik Negara di KPKNL Purwakarta atas aset tetap berupa Tanah.

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwakarta per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 20.819.298.000 dan Rp 20.819.298.000. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

SALDO Nilai Perolehan Per 01 Januari 2020	20.819.298.000
Mutasi Tambah:	
Pembelian	0,00
Transfer Masuk	0,00
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0,00
Pengembangan Nilai Aset	0,00
Reklasifikasi Masuk	0,00
Perolehan Lainnya	0,00
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	0,00
Penambahan Saldo Awal	0,00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	0,00
Pembatalan Penghapusan	0,00
Mutasi Kurang:	
Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	(0,00)
Penghapusan	(0,00)
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	(0,00)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	(0,00)

Reklasifikasi Keluar	(0,00)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	(0,00)
Transfer Keluar	(0,00)
Saldo per 31 Desember 2021	20.819.298.000

Rincian saldo tanah per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	355	Jln. Pramuka No. 54 Jatiluhur, Purwakarta	625.198.000
2	400	Jln. Abdul Kodir, Komplek KPPN	541.900.000
3	800	Jln. Veteran No. 249 Purwakarta	4.286.200.000
4	2.000	Jln. Siliwangi No. 9 Purwakarta	15.366.000.000
Jumlah			20.819.298.000

C.14 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin
Rp5.064.505.86
3

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp5.064.505.863,- dan Rp5.126.331.863,-. Sedangkan nilai buku Aset Peralatan dan Mesin pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp620.154.790,-.

Mutasi nilai Aset Peralatan dan Mesin tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Mutasi Aset berupa Peralatan dan Mesin

Saldo Perolehan per 1 Januari 2021	5.126.331.863
Mutasi Tambah :	
Pembelian	39.424.000
Transfer Masuk	-
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	-
Pengembangan Nilai Aset	-
Reklasifikasi Masuk	-
Perolehan Lainnya	-
Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke aset tetap	-
Penambahan saldo awal	-
Koreksi Pencatatan nilai/kuantitas (+)	-
Pembatalan penghapusan	-
Mutasi Kurang :	
Transaksi normalisasi BMN aset tetap	-
Penghapusan	101.250.000
Usulan barang rusak berat ke pengelola	-
Koreksi Pencatatan nilai/kuantitas (+)	-
Reklasifikasi keluar	-
Penghentian aset dari penggunaan	-
Transfer Keluar	-
Saldo per 31 Desember 2021	5.064.505.863

Realisasi belanja modal Aset Peralatan dan Mesin Semester II dan
Tahunan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 39.424.000,-.

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin
sebagai berikut :

a. Transaksi penambahan dari pembelian

1	Alat angkutan darat bermotor	-
2	Perangkat pengolah data dan komunikasi	39.424.000
3	Peralatan dan fasilitas perkantoran	-
4	Alat studio	-
5	Alat komunikasi	-
	Jumlah	39.424.000

b. Transaksi penambahan dari reklasifikasi masuk

1	Alat ukur	-
2	Alat kantor lainnya	-
	Peralatan studio pemetaan/	
3	Peralatan ukur tanah	-
4	Peralatan komputer	-
	Jumlah	-

c. Transaksi penambahan dari pengembangan nilai aset

1	Alat kantor	-
2	Alat rumah tangga	-
	Jumlah	-

d. Transaksi pengurangan dari transfer keluar

1	Alat Angkutan darat bermotor	-
2	Alat bengkel tak bermesin	-
3	Alat kantor	-
4	Alat rumah tangga	-
5	Alat studio	-
6	Komputer Unit	-
	Jumlah	-

e. Transaksi pengurangan dari reklasifikasi keluar

f. Transaksi pengurangan dari penghentian aset dari penggunaan

g. Transaksi pengurangan dari penghapusan

1	Alat Angkutan darat bermotor	101.250.000
2	Alat bengkel tak bermesin	-
3	Alat kantor	-
4	Alat rumah tangga	-
5	Alat studio	-
6	Komputer Unit	-
	Jumlah	101.250.000

C.15 Gedung dan Bangunan

Gedung dan
Bangunan Rp
7.604.879.500

Nilai Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp7.604.879.500,- dan Rp7.604.879.500,-. Sedangkan nilai buku Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp 6.849.564.181,-.

Mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Mutasi Gedung dan Bangunan

Saldo Perolehan per 1 Januari 2021	7.604.879.500
Mutasi Tambah :	
Transfer Masuk	-
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	-
Pengembangan Nilai Aset	-
Reklasifikasi Masuk	1.246.985.518
Perolehan Lainnya	-
Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke aset tetap	-
Penambahan saldo awal	-
Koreksi Non Revaluasi Saldo Awal Migrasi IP	-
Koreksi Penghapusan akibat koreksi revaluasi	-
Mutasi Kurang :	
Transaksi normalisasi BMN aset tetap	-
Usulan barang rusak berat ke pengelola	-
Koreksi Revaluasi Saldo Awal Migrasi IP (-)	-
Reklasifikasi keluar	1.246.985.518
Transfer keluar	-
Saldo per 31 Desember 2021	7.604.879.500

Realisasi belanja modal Aset Gedung dan Bangunan Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 0,-.

Transaksi penambahan dan pengurangan gedung dan bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Transaksi penambahan dari Pengembangan melalui KDP

1	Bangunan Gedung Kantor	0
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0

b. Transaksi penambahan dari Koreksi Nilai Aset (+)

1.	Koreksi Non Revaluasi Saldo Awal Migrasi IP	0
----	---	---

2.	Koreksi Penghapusan akibat koreksi revaluasi	0
----	--	---

c. Transaksi pengurangan dari Penghentian Aset dari Penggunaan

1	Bangunan Gedung Kantor	-
---	------------------------	---

d. Transaksi pengurangan dari Koreksi Nilai Aset (-)

1.	Koreksi Revaluasi Saldo Awal Migrasi IP (-)	0
----	---	---

C.16 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Rp0

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Nilai buku Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp0,- yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Realisasi belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,-.

C.17 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap
Lainnya
Rp13.922.600

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp13.922.600,- dan Rp0,-. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian. Nilai buku Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp13.922.600,- yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya pada Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,-.

C.18 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp0

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Saldo Konstruksi dalam pengerjaan mencakup Saldo aset tetap yang masih dalam proses pembangunan, yang sampai dengan tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan, sebagai berikut :

No.	Jenis KDP	Nomor, Tanggal & Nilai Kontrak	Sumber Dana	Biaya Yang Sudah Dikeluarkan	% KDP
-----	-----------	--------------------------------	-------------	------------------------------	-------

-	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
---	-------	-------	-------	-------	-------

C.19 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp(5.199.666.3
92)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing Rp(5.199.666.392),- dan Rp(4.813.042.446),-.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). .

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	20.819.298.000	0	20.819.298.000
2	Peralatan & Mesin	5.064.505.863	(4.444.351.073)	620.154.790
3	Gedung & Bangunan	7.604.879.500	(755.315.319)	6.340.244.694,00
4	Jalan, Irigasi & Jaringan	0	0	0
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
6	Aset Tetap Lainnya	13.922.600	0	13.922.600
	Jumlah	33.502.605.963,00	(5.199.666.392)	28.302.939.571

Aset Lainnya

Aset Lainnya
Rp 944.223.588

Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp944.223.588,- dan Rp958.146.188,- yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Sedangkan nilai buku Aset Lain-Lain pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp0,-.

Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan tersebut terdiri dari:

Rincian Aset Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Aset Tak Berwujud	0	0
2	Aset Lain-lain	944.223.588	958.146.188
	Jumlah	944.223.588	958.146.188
	Akumulasi Penyusutan	(944.223.588)	(944.223.588)
	Nilai Buku	0	13.922.600

C.20 Aset Tak Berwujud (ATB)

Aset Tak
Berwujud Rp0

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp0,- dan Rp0,-.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik, Aset Tak Berwujud pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwakarta berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Mutasi Aset Tak Berwujud

Saldo Perolehan per 1 Januari 2021	0
Mutasi Tambah :	
Pembelian	0
Transfer Masuk	0
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	0
Pengembangan Nilai Aset	0
Reklasifikasi Masuk	0
Perolahan Lainnya	0
Reklasifikasi dari Aset Lainnya Ke Aset Tetap	0
Penambahan Saldo Awal	0
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	0
Pembatalan Penghapusan	0
Mutasi Kurang:	
Transaksi normalisasi BMN Aset Tetap	0
Penhapusan	0
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	0
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	0
Reklasifikasi Keluar	0
Penghentian Aset dari Penggunaan	0
Transfer Keluar	
Saldo per 31 Desember 2021	0

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai
1	Software komputer	-
2	Aset tak berwujud lainnya	-
	Jumlah	-

C.21 Aset Lain-lain

Aset Lain-Lain
Rp944.223.588

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp944.223.588,- dan Rp958.146.188,-.

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Mutasi transaksi terhadap Aset Lain-lain pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Mutasi Aset Lain-lain

Saldo Perolehan per 1 Januari 2021	0
Mutasi Tambah :	
Pembelian	0
Transfer Masuk	0
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	0
Pengembangan Nilai Aset	0
Reklasifikasi Masuk	0
Perolahan Lainnya	0
Reklasifikasi dari Aset Tetap Ke Aset Tetap Lainnya	0
Penambahan Saldo Awal	0
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	0
Pembatalan Penghapusan	0
Mutasi Kurang:	
Transaksi normalisasi BMN Aset Tetap	0
Penghapusan	0
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	0
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (-)	0
Reklasifikasi Keluar	0
Penghentian Aset dari Penggunaan	0
Transfer Keluar	
Saldo per 31 Desember 2021	0

Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi
Aset Lainnya
Rp(944.223.588
)

C.22 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing Rp(944.223.588) dan Rp(944.223.588).

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud	0	0,00	0
2	Aset Lain-lain	0,00	(944.223.588)	0,00
	Jumlah	0,00	(944.223.588)	0,00

Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban
Jangka Pendek
Rp1.184.754.354,
63

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 tersaji sebesar Rp 1.184.754.354,63 dan Rp 99.577.411,-.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Rincian Kewajiban Jangka Pendek tersaji pada Tabel berikut :

Kewajiban Jangka Pendek

No	Jenis Kewajiban Jangka Pendek	Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021	Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2020
1	Uang Muka dari KPPN	0	0
2	Utang kepada Pihak Ketiga	1.184.754.354,63	99.577.411
3	Pendapatan Diterima Dimuka	0	0
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.184.754.354,63	99.577.411

C.23 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari
KPPN Rp0

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Uang muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran yang ada dikelompokkan ke dalam aset lancar.

C.24 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada
Pihak Ketiga Rp
1.184.754.354,
63

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 1.184.754.354,63 dan Rp 99.577.411,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

1.	Dana pihak Ketiga	1.184.754.354,63
	JUMLAH	1.184.754.354,63

Pendapatan
Diterima di
Muka Rp0

C.25 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

Ekuitas
Rp28.351.879.8
96

C.26 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing Rp 28.351.879.896,- dan Rp 28.752.238.910,- Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan
PNBP Rp
5,776,151,928

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 11.057.638.762,- dan Rp 8.167.423.585,-. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak

URAIAN	Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021	Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2020	Naik/(Turun)
Pendapatan dari Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	5.235.000	4.587.000	648.000
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	64.004.999	-	64.004.999
Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh Yang Berhak	-	-	-
Pendapatan Jasa Lainnya	80.752.385	61.524.308	19.228.077
Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	1.955.724.740	755.972.692	1.199.752.048
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	8.942.594.543	7.242.379.861	1.700.214.682
Pendapatan Biad Pengurusan Piutang Negara	7,590.195	102.359.724	(94.769.529)
JUMLAH	11.055.901.862	8,166.823.585	2.889.078.277

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp0

Jumlah Beban Pegawai Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 dan Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp1.231.144.805,-. Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 dan Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2020

Uraian	Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 (Rp)	Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2020 (Rp)	Naik/ (Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	-	895,605,100	(895,605,100)	(100%)
Beban Pembulatan Gaji PNS	-	12,960	(12,960)	(100%)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	-	62,019,480	(62,019,480)	100%
Beban Tunj. Anak PNS	-	20,976,346	(20,976,346)	100%
Beban Tunj. Struktural PNS	-	31,680,000	(31,680,000)	100%
Beban Tunj. Fungsional PNS	-	12,600,000	(12,600,000)	100%
Beban Tunj. PPh PNS	-	318,510	(318,510)	100%
Beban Tunj. Beras PNS	-	44,610,720	(44,610,720)	100%
Beban Uang Makan PNS	-	128,481,850	(128,481,850)	100%
Beban Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS dalam dan luar negeri	-	-	-	-
Beban Tunj. Umum PNS	-	35,210,000	(35,210,000)	100%
Beban Uang Lembur	-	-	-	-
Realisasi Beban Pegawai Bruto	-	1,231,514,966	(1,231,514,966)	100%
<i>Pengembalian</i>	-	370,000	(37,000)	100%
Realisasi Beban Pegawai Netto	-	1,231,144,966	(1,231,144,966)	100%

D.3 Beban Persediaan

Beban
Persediaan
Rp82.064.050

Jumlah Beban Persediaan pada Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 dan Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2020 adalah masing-masing sebesar Rp82.064.050,- dan Rp141.852.858,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Semester II dan Tahunan

Tahun Anggaran 2021 dan Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Persediaan
Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 dan Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2020

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020	NAIK/ (TURUN)
Beban Persediaan Konsumsi	82.064.050	141.852.858	626.830
Beban pita cukai	0	0	0
Bahan baku	0	0	0
Beban Persediaan untuk Pemeliharaan	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0
JUMLAH	82.064.050	141.852.858	626.830

Beban Barang &
Jasa
Rp1.074.584.45
9,-

D.4 Beban Barang & Jasa

Jumlah Beban Jasa pada Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 dan Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 1.074.584.459,- dan Rp 1.054.964.988,-. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 dan Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

**Rincian Beban Barang dan Jasa
Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 dan Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2020**

Uraian	Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021	Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2020	Naik/ (Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	607.600.350	595.894.846	11.705.504	1,93%
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	-	-	-	-%
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	13.478,400	18.733.000	(827.000)	(28,05%)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	165.822,000	186.960.000	(21.138.000)	(11,3%)
Beban Barang Operasional Lainnya	8,400.000	-	8.400.000	-%
Beban Barang Operasional – Penanganan Covid-19	71.139.448	80.805.463	(9.666.015)	(11,96%)
Beban Bahan	4.663.000	13.805.500	(9.142.500)	(66,22%)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	39.600.000	-	39.600.000	-%
Beban Honor Output Kegiatan	-	-	-	-%
Beban Langganan Listrik	130.471.793	142.606.469	(12.134.676)	(8,50%)
Beban Langganan Telepon	23.529.968	14.408.110	9.121.858	38,77%
Beban Langganan Air	730.500	701.600	28.900	3,96%
Beban Jasa – Penanganan Covid-19	9.149.000	1.050.000	8.099.000	88,52%
Beban Jasa Konsultan	-	-	-	-%
Beban Sewa	-	-	-	-%
Jumlah	1.074.584.459	1.054.964.988	19.619.471	1,83%

D.6 Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan
Rp351.158.252

Beban Pemeliharaan pada Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 dan Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2020 adalah masing-masing sebesar Rp351.158.252,- dan Rp397.013.911,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 dan Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 dan Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2020

Uraian	Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021	Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2020	Naik/ (Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	177.152.589	217.901.373	(40.748.784)	(18.70%)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	-	-	0	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	174.005.663	179.112.538	(5.106.875)	2.85%
Jumlah	351.158.252	397.013.911	(45.855.659)	(11.55%)

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban
Perjalanan
Dinas
Rp111.705.500

Beban Perjalanan Dinas pada Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 dan Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2020 adalah masing-masing sebesar Rp111.705.500,- dan Rp137.597.600,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 dan Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 dan Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2020

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020	NAIK/ (TURUN)	%
Beban Perjalanan Biasa	98.105.500	119.497.600	(21.392.100)	17,90%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.600.000	18.100.000	(4.500.000)	24,86%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-	
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	-	-	
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	-	-	-	
Total Beban Perjalanan Dinas	111.705.500	137.597.600	(25.892.100)	18,82%

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp487.873.946

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 dan Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2020 adalah masing-masing sebesar Rp487.873.946,- dan Rp490.317.880,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 dan Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 dan Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2020

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020	NAIK/(TURUN)
Beban penyusutan peralatan dan mesin	313.446.874	315.846.727	(2.399.853)
Beban penyusutan gedung dan bangunan	174.427.072	174.471.153	(44.081)
Beban penyusutan jalan, irigasi dan jaringan			
Beban penyusutan aset tetap lainnya			
Beban penyusutan aset lainnya			
JUMLAH	487.873.946	490.317.880	2.443.934

D.8 Beban Lain-Lain

Beban Lain-lain
Rp0

Jumlah Beban Lain-Lain untuk Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 dan Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- . Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Lain-lain untuk Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 dan Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Lain-lain
Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 dan Semester II dan
Tahunan Tahun Anggaran 2020

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	-	-	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.9 Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit
dari Kegiatan
Non
Operasional
Rp64.941.899

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 dan Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Kegiatan Non Operasional
Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 dan Semester II dan Tahunan Tahun
Anggaran 2020

URAIAN JENIS BEBAN	31 Des 2021	31 Des 2020	NAIK/(TURUN)
Surplus penjualan aset non lancar	64.004.999	0	64.004.999
Pendapatan pelepasan aset non lancar	64.004.999	0	64.004.999
Beban pelepasan aset non lancar	0	925.690	(925.690)
Surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya	0	117.514	(117.-514)
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	945.900	117.514	828.386
Beban dari kegiatan non operasional lainnya	9.000	0	9000
JUMLAH	64.941.899	(808.176)	64.824.385

D.10 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa
Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 dan Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa
Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 dan Semester II dan
Tahunan Tahun Anggaran 2020

URAIAN	31 Des 2021	31 Des 2020	Naik (Turun) %
Pendapatan PNPB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
Jumlah	-	-	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp28.752.238.910

Nilai ekuitas pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp28.752.238.910,- dan Rp 28.602.498.060,-

E.2 Surplus (Defisit) LO

Surplus LO
Rp8.982.788.328

Jumlah Surplus/ Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Surplus LO sebesar Rp8.982.788.328,- dan Rp 4.713.723.367,-. Sedangkan Defisit LO merupakan selisih kurang antar surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. Surplus LO merupakan selisih lebih antar surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai
Persediaan
Rp0,00

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 dan Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut; NIHIL.

E.4 Koreksi Aset Tetap

Koreksi Aset
Tetap Rp0,00

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada Laporan Keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,- dan Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2020 koreksi pencatatan aset tetap Rp (27.532.450,-) terdiri dari selisih revaluasi aset Rp (33.180.000,-) dan koreksi nilai aset non revaluasi Rp 5.647.550,-. Nilai Koreksi nilai aset tetap tersebut adalah koreksi nilai tanah dan gedung bangunan .

E.5 Koreksi Atas Beban

Koreksi Atas
Beban Rp0,00

Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban untuk Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 dan Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

E.6 Koreksi Atas Pendapatan

Koreksi Atas
Pendapatan
Rp0,00

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Pendapatan untuk Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2021 dan Semester II dan Tahunan Tahun Anggaran 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

E.7 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp28.351.879.8
96

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 28.351.879.896,- dan Rp 28.752.238.910,-.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

Tidak terdapat pengungkapan penting lainnya.

F. 1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.

F. 2. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Tidak ada temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

F. 3. INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA AKRUAL

Daftar informasi pendapatan dan belanja akrual disajikan sebagaimana dalam lampiran.

F. 4. REKENING PEMERINTAH

Daftar informasi rekening pemerintah disajikan sebagaimana dalam lampiran.

F. 5. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Pada tahun anggaran 2021, telah dilakukan revisi DIPA sebanyak 7 (tujuh) kali yang dijelaskan sebagai berikut :

Revisi DIPA Tahun Anggaran 2021

No.	Revisi ke-	Tanggal pengesahan	Pagu Anggaran	Keterangan
1	00	13 November 2020	2.022.435.000	DIPA Pertama
2	01	16 Februari 2021	2.017.035.000	Revisi RPD Triwulan I
3	02	12 Juli 2021	2.017.035.000	Penghematan ke-1
4	03	22 Juli 2021	1.984.057.000	Revisi RPD Triwulan II
5	04	04 Agustus 2021	1.757.479.000	Penghematan ke-2
6	05	06 Oktober 2021	1.757.479.000	Revisi RPD Triwulan III
7	06	28 Oktober 2021	1.757.479.000	Revisi Bag. Keuangan DJKN (Optimalisasi belanja pegawai)
8	07	01 Desember 2021	1.757.479.000	Revisi Pagu Minus Belanja Pegawai

Berdasarkan Surat Pernyataan Nomor : PYT- 01/KNL.0804/2022 tanggal 13 Mei 2022, Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat dari pengunggahan perubahan atau koreksi data laporan keuangan.

LAMPIRAN

**KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT SATKER
TAHUN 2021**

Kode BA Es1 Wilayah Satker dan Nama Satker/Eselon I/Wilayah/KL:

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Seharusnya
<i>Beri tanda centang (V) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>		
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>		
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN		
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (Hardcopy)	Ada	Tidak
1. LRA face	V	Ada
2. Neraca face	V	Ada
3. Laporan Operasional face	V	Ada
4. Laporan Perubahan Ekuitas face	V	Ada
5. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja	V	Ada
6. Neraca Percobaan Akrua	V	Ada
7. Neraca Percobaan Kas	V	Ada
8. Catatan atas Laporan Keuangan	V	Ada
KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY DENGAN E-REKON&LK		
	Sama	Tidak
1. Periksa semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) apakah sama dengan e-Rekon&LK	V	Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan e-Rekon&LK sehingga seharusnya sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>		
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI		
Neraca Balance	Ada	Tidak
1. Adakah satker Neracanya tidak balance? Cek di e-Rekon&LK melalui menu "Daftar >> Neraca Tidak Balance"		V
Saldo antar Laporan	Sama	Tidak
2. Apakah Nilai "Surplus/(Defisit) - LO" di LO = Nilai "Surplus/(Defisit) - LO" di LPE	V	Sama
3. Apakah saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	V	Sama
4. Pada LPE: apakah "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	V	Sama
<i>Apabila perhitungan no.4 diatas menghasilkan "tidak sama" berarti ada jurnal menggunakan akun 391111, cari transaksi menggunakan e-Rekon&LK kemudian perbaiki</i>		
NERACA PERCOBAAN AKRUAL		
Pengecekan Saldo Tidak Normal Posisi Debet/Kreditnya	Ada	Tidak
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau tidak ada uraiannya		V
2. Adakah "Saldo Tidak Normal"? Cek e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Saldo Tidak Normal", kecuali akun Beban Penyisihan Piutang		V
Pengecekan Akun yang tidak boleh ada	Ada	Tidak
Akun "Belum Diregister"		
1. Adakah akun "Belum Diregister"? Cek e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Aset Belum Diregister"		V
<i>Pada LK Tahunan akun "Belum Diregister" tidak boleh ada</i>		
Akun "Aset, KDP, Penyusutan/Amortisasi dan Beban terkait Aset BLU"	Ada	Tidak
1. Adakan akun "Persediaan, Aset, KDP, dan Beban terkait Aset BLU"		V
2. Adakah akun "Akumulasi Penyusutan Aset Tetap/Amortisasi Aset Tak Berwujud terkait Aset BLU" (termasuk akumulasi penyusutan/amortisasi atas penghentian aset tetap/aset tak berwujud)		V
<i>Mulai Laporan Keuangan Semesteran 2017 tidak ada lagi akun Aset dan Beban terkait Persediaan/Aset "BLU"</i>		
Akun Ekuitas (3xxxxx)	Ada	Tidak
1. Adakah akun 319121 (Ekuitas Transaksi Lainnya) Kec. di RRI, TVRI dan POLRI		V
2. Adakah akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		V
Akun Perpajakan (41xxxx)	Ada	Tidak
1. Adakah akun 41xxxx (Pendapatan Perpajakan) kecuali BA 015.04		V
Akun Khusus BUN (Tidak boleh ada di KL)	Ada	Tidak
1. Adakah akun 1111xx hingga 1115xx? (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		V

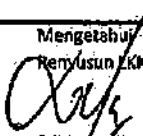
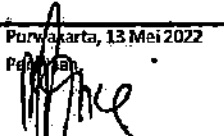
Transaksi Hibah, Bunga, Subsidi, Lain-lain dan Transfer merupakan Transaksi BUN, periksa apakah ada akun dengan uraian diatas, yaitu:		Ada	Tidak	Seharusnya
2.	Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-Lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (<i>prepaid</i>)	☒	V	Tidak
3.	Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain	☒	V	Tidak
4.	Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-Lain Yang Masih Harus Dibayar	☒	V	Tidak
5.	Akun 423954/5/6/8/9 Penerimaan Kembali Belanja Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/Lain-Lain/Transfer TAYL	☒	V	Tidak
6.	Adakah akun 43xxxx (Pendapatan Hibah)	☒	V	Tidak
7.	Adakah akun 54xxxx (Beban Bunga)	☒	V	Tidak
8.	Adakah akun 55xxxx (Beban Subsidi)	☒	V	Tidak
9.	Adakah akun 56xxxx (Beban Hibah)	☒	V	Tidak
10.	Adakah akun 58xxxx (Beban Lain-Lain)	☒	V	Tidak
Selain akun2 diatas, masih ada akun2 khusus BUN, seperti 421611, 423252, 42353, 423254, 423341, dll)				
Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun yang tidak normal keberadaannya? (misalnya pendapatan SIM/STNK/Kejaksaa ternyata terdapat pada Kementerian Kesehatan)	☒	V	Tidak
2.	Adakah akun 423319 Pendapatan Bunga Lainnya di KL? (seharusnya 423221 (Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)))	☒	V	Tidak
Jika Tidak Memiliki Satker BLU		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian BLU?	☒	V	Tidak
2.	Adakah akun 424xxx (Pendapatan BLU)	☒	V	Tidak
3.	Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)	☒	V	Tidak
4.	Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)	☒	V	Tidak
Hibah Langsung		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah saldo 218211 (hibah langsung yang belum disahkan) pada awal tahun?	☒	V	Tidak
2.	Apakah saldo akun "Hibah Langsung yang Belum Disahkan" pada akhir tahun sama nilainya dengan Saldo Awal 2021?	☒	V	Tidak
Jika lebih kecil, kemungkinan ada jurnal yang mengurangi akun 218211 (cek apakah jurnal tsb. benar), jika lebih besar, kemungkinan ada hibah langsung tahun 2017 yang belum disahkan (segera disahkan)				
3.	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah yang Belum Disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung yang Belum Disahkan)?	☒	☒	Tidak
Transfer Masuk (TM) dan Transfer Keluar (TK)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Isi kolom di sebelah kanan hasil dari perhitungan akun TM dikurangi akun TK	0		
2.	Jika kolom No.1 bernilai positif, adakah TM dari KL lain senilai tsb.?	V	☒	Ya
3.	Jika kolom No.1 bernilai negatif, adakah TK ke KL senilai tsb.?	V	☒	Ya
Lakukan telaah menggunakan e-Rekon&LK (menu monitoring >> Transfer Masuk/Keluar)				
Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)?	☒	V	Tidak
2.	Jika ada, mungkinkah mendapat Aset dari Perolehan Lainnya?	☒	V	Tidak
Pendapatan (491511) dan Beban (593311) Penyesuaian Nilai Persediaan		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Isi kolom di sebelah kanan hasil dari perhitungan akun 491511 dikurangi akun 593311	-		
2.	Apakah selisih nilai diatas normal? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil?	☒	V	Tidak
LAPORAN OPERASIONAL				
Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah pendapatan Perpajakan (kecuali BA.015)	☒	V	Tidak
2.	Adakah pendapatan Hibah	☒	V	Tidak
3.	Adakah beban bunga	☒	V	Tidak
4.	Adakah beban subsidi	☒	V	Tidak
5.	Adakah beban hibah	☒	V	Tidak
6.	Adakah beban transfer	☒	V	Tidak
7.	Adakah beban lain-lain	☒	V	Tidak
Pengecekan saldo Normal		Ada	Tidak	Seharusnya
8.	Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya	☒	V	Tidak
9.	Apakah seluruh akun di LO bernilai positif?	V	☒	Ya
Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali beban penyesihan piutang dapat bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunnnya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada LO dapat bernilai Negatif).				
Kebenanaran Beban Penyesihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015		Ya	Tidak	Seharusnya
10.	Saldo Awal Penyesihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) - Saldo Akhir Penyesihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) = Beban Penyesihan Piutang LO	☒	V	Ya
Jika hasil diatas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih diatas. Jika tidak ada, kemungkinan salah dalam menjurnal penyesihan piutang.				

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
Pengecekan akun tertentu	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Pos "penyesuaian Nilai Aset"	☒	☐	Tidak
2. Adakah akun "Selisih Revaluasi Aset Tetap" ?	☐	☒	Ada/Tidak
Bila ada "Selisih Revaluasi Aset Tetap" apakah benar ada Penilaian Kembali/Revaluasi BMN dari DIKN/KPKNKL?	☐	☒	Ada
Pengecekan akun koreksi			
Cetak seluruh akun koreksi per satker dari e-Rekon&LK (Menu Rincian >> Rincian LK >> Daftar Saldo Akrua), yaitu 391113, 391114, 391116, 391118, 391119	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	☐	☒	Ya
N E R A C A			
	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	☒	☐	Tidak
2. Adakah pos "Belum Diregister"?	☒	☐	Tidak
3. Dari kolom perbandingan antara Tahun 2021 dengan 2020, adakah Kenaikan/Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi) tanpa penjelasan?	☒	☐	Tidak
4. Normalnya total ASET akan naik dibanding tahun 2020. Apakah demikian?	☐	☒	Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN			
<i>Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"</i>			
Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:	☒	☐	Tidak
- Penyisihan Piutang/Pyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Pyisihan TP/TGR (Neraca)	☒	☐	Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)	☒	☐	Ada
Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. panjang	Ada	Tidak	Seharusnya
2. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:	☒	☐	Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang	☒	☐	Ada
Pengecekan persediaan	Ada	Tidak	Seharusnya
3. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:	☐	☒	Ada/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)	☐	☒	Ada
- Pendapatan Penyesuaian Persediaan (akun 491511 di Neraca Percobaan)	☐	☒	Ada
- Beban Penyesuaian Persediaan (akun 593311 di Neraca Percobaan)	☒	☐	Ada
Pengecekan penyusutan aset tetap	Ada	Tidak	Seharusnya
4. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:	☐	☒	Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)	☐	☒	Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	☐	☒	Ada
Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos	Ada	Tidak	Seharusnya
5. Adakah beban barang diserahkan ke masyarakat?	☒	☐	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas?	☒	☐	Ya
6. Adakah beban bansos?	☒	☐	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada neraca percobaan kas?	☒	☐	Ya
Pengecekan Jurnal Akrua	Ada	Tidak	Seharusnya
7. Ada realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (423141/2/3 atau 42492x)	425131	☐	Ada/Tidak
- Ada pendapatan sewa diterima dimuka (akun 219211) pada Neraca?	☒	☐	Ada/Tidak
8. Adakah realisasi Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas (522141)	☒	☐	Ada/Tidak
- Ada belanja Barang dibayar dimuka pada Neraca	☒	☐	Ada/Tidak
9. Ada realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)?	☐	☒	Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar (Neraca)	☒	☐	Ada
KESESUAIAN DENGAN L-BMN			
	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah semua akun di Neraca LK sama dengan di L-BMN?	☐	☐	Ya
<i>Jika telah menggunakan SIMAK e-Rekon (e-Rekon&LK G2) maka lihat pada menu "monitoring >> rekon internal"</i>			
2. Apakah menurut e-Rekon&LK terdapat Jurnal Tidak Lazim (menu Daftar >> Jurnal Tidak Lazim) yaitu jurnal dengan akun Persediaan/Aset yang seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi SIMAK?	☒	☐	Tidak
<i>Jika ada, apakah jurnal tersebut telah benar? Lakukan pengecekan</i>			

LAPORAN REALISASI ANGGARAN			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Pagu Minus? (Cek melalui e-Rekon&LK menu daftar >> pagu minus?)	☒	☒	Tidak
2. Ada uraian jenis belanja "tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas?	☒	☒	Tidak
3. Adakah TDK pada aplikasi e-Rekon&LK? (Menu Monitoring >> Transaksi Dalam Konfirmasi) atas seluruh jenis TDK baik pada Saldo DIPA Aktif maupun Tidak Aktif	☒	☒	Tidak

PENCAWASAN TEMUAN BPK TAHUN - TAHUN SEBELUMNYA			
Telaah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuan yang berulang. Dibawah ini adalah contoh-contoh telaahnya.			
Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah sudah dibuat Berita Acara Stork Opname Persediaan?	☒	☒	Ya
2. Masih adakah kesalahan akun belanja persediaan?	☒	☒	Tidak
3. Apakah PNPB telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat)?	☒	☒	Ya
4. Adakah PNPB digunakan langsung?	☒	☒	Tidak
5. Apakah seluruh pendapatan dan belanja BUL telah disahkan (di-SP3B-BLUkan)?	☒	☒	Ya
6. Apakah seluruh hibah langsung telah disahkan (di-SP3HL-kan)?	☒	☒	Ya
7. Apakah semua jurnal manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Pencatatannya beserta dokumen terkait?	☒	☒	Ya

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN			
Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LYKL (Neraca Percobaan)	☒	☒	Sama
Keengkapan Pengungkapan pada CaLK			Seharusnya
2. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai?	☒	☒	Ya
3. Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE dan Neraca?	☒	☒	Ya
4. Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai?	☒	☒	Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN	
<i>"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan e-Rekon-LK"</i>	
Mengetahui/ Penyusun KKL  Edi Juwadi NIP. 197704221998031001	Purwakarta, 13 Mei 2022 Pemeriksaan  Yuni Ningsih Aji NIP. 196806201995012001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

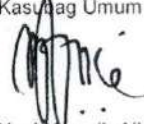
Kementerian : KEMENTERIAN KEUANGAN
 Negara/Lembaga : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
 Eselon I : Kanwil DJKN Jawa Barat
 Wilayah : KPKNL Purwakarta
 Satuan Kerja : 10-003/WKN.08/KNL.04/2021
 No Dokumen : 31-DES-21
 Tanggal : Tahun 2021
 Tahun Anggaran : Koreksi LK Audited atas kinerja lelang tahun 2021 namun PNBP bea
 Keterangan : lelangnya baru disetorkan di tahun 2022

Kategori Jurnal Penyesuaian

☐	Pendapatan Diterima di Muka	☐	Koreksi Antar Beban
☒	Pendapatan Yang Masih Harus diterima	☐	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐	Belanja Dibayar di Muka	☐	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐	Belanja yang Masih Harus Dibayar	☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐	Penghapusan Piutang	☐	Transfer Masuk
☐	Penyusutan Aset	☐	Transfer Keluar
☐	Kas di Bendahara Penerimaan	☐	Reklasifikasi Neraca
☐	Kas di Bendahara Pengeluaran	☐	Koreksi
☐	Persediaan		

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	114311	Pendapatan yang Masih harus diterima	27.756.769	
2	K	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I		27.756.769

Kasubag Umum



Yuni Narasih Aji
 NIP196806201995012001

31-DES-21



Kuasa Pengguna Anggaran

Wahjudi Fajogo
 NIP.196221997031001

31-DES-21

Opreator GLP - SAKTI



Edi Junaedi
 NIP.197704221998031001

31-DES-21

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : KEMENTERIAN KEUANGAN
 Negara/Lembaga : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
 Eselon I : Kanwil DJKN Jawa Barat
 Wilayah : KPKNL Purwakarta
 Satuan Kerja :
 No Dokumen : 14-001/WKN.08/KNL.04/2021
 Tanggal : 31-DES-21
 Tahun Anggaran : Tahun 2021
 Keterangan : Koreksi LK Audited atas kinerja lelang tahun 2021 namun PNBP bea lelangnya baru disetorkan di tahun 2022

Kategori Jurnal Penyesuaian

☐	Pendapatan Diterima di Muka	☐	Koreksi Antar Beban
☒	Pendapatan Yang Masih Harus diterima	☐	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐	Belanja Dibayar di Muka	☐	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐	Belanja yang Masih Harus Dibayar	☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐	Penghapusan Piutang	☐	Transfer Masuk
☐	Penyusutan Aset	☐	Transfer Keluar
☐	Kas di Bendahara Penerimaan	☐	Reklasifikasi Neraca
☐	Kas di Bendahara Pengeluaran	☐	Koreksi
☐	Persediaan		

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	114311	Pendapatan yang Masih harus diterima	29.004	
2	K	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I		29.004

Kasubag Umum

Yuni Marasih Aji
 NIP 196806201995012001

31-DES-21



Kuasa Pengguna Anggaran

Wahyudi Pralogo
 NIP 197206221997031001

31-DES-21

Opreator GLP - SAKTI

Edi Junaedi
 NIP 197704221998031001

31-DES-21

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015	KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : 09	DITJEN KEKAYAAN NEGARA
KDUAPPAW : 01509008KD	Kanwil DJKN Jabar
KODE SATKER : 506208	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWAKARTA

Tgl. Cetak 18/05/2022 2:09 AM
lap_neraca_satker_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Penerimaan	6,150,000	600,000	5,550,000	925.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	1,184,754,354.63	82,613,602	1,102,140,753	1,334.09
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	27,785,773	0	27,785,773	0.00
Persediaan	15,004,552	17,213,202	(2,208,650)	(12.83)
JUMLAH ASET LANCAR	1,233,694,679.63	100,426,804	1,133,267,876	1,128.45
ASET TETAP				
Tanah	20,819,298,000	20,819,298,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	5,064,505,863	5,126,331,863	(61,826,000)	(1.21)
Gedung dan Bangunan	7,604,879,500	7,604,879,500	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	13,922,600	0	13,922,600	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(5,199,666,392)	(4,813,042,446)	(386,623,946)	8.03
JUMLAH ASET TETAP	28,302,939,571	28,737,466,917	(434,527,346)	(1.51)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	944,223,588	958,146,188	(13,922,600)	(1.45)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(944,223,588)	(944,223,588)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0	13,922,600	(13,922,600)	(100.00)
JUMLAH ASET	29,536,634,250.63	28,851,816,321	684,817,930	2.37
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	1,184,754,354.63	99,577,411	1,085,176,944	1,089.78
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1,184,754,354.63	99,577,411	1,085,176,944	1,089.78
JUMLAH KEWAJIBAN	1,184,754,354.63	99,577,411	1,085,176,944	1,089.78
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	28,351,879,896	28,752,238,910	(400,359,014)	(1.39)
JUMLAH EKUITAS	28,351,879,896	28,752,238,910	(400,359,014)	(1.39)
JUMLAH EKUITAS	28,351,879,896	28,752,238,910	(400,359,014)	(1.39)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	29,536,634,251	28,851,816,321	684,817,930	2.37

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 0200 JAWA BARAT
SATUAN KERJA : 506208 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWAKARTA

Tgl. Cetak 18/05/2022 2:08 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	6,150,000	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	1,184,754,354.63	0
0.0	114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	27,785,773	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	15,004,552	0
0.0	131111	Tanah	20,819,298,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	5,064,505,863	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	7,604,879,500	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	13,922,600	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	4,444,351,073
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	755,315,319
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	944,223,588	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	944,223,588
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	0
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	0
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	1,184,754,354.63
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	0
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	0
0.0	219963	Utang Pajak Bendahara Penerimaan yang Belum Disetor	0	0
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	1,673,691,420
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	11,056,838,762	0
0.0	391111	Ekuitas	0	28,752,238,910
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	64,004,999
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	5,235,000
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	80,752,385
3.0	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	8,976,703,044
3.1	425782	Pengembalian Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	800,000	0
3.0	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	1,955,724,740
3.0	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	7,617,467
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	936,900
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	9,000
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	607,600,350	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	13,478,400	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	165,822,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	8,400,000	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	71,139,448	0
3.0	521211	Beban Bahan	4,663,000	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
UNIT ORGANISASI : 09
WILAYAH/PROVINSI : 0200
SATUAN KERJA : 506208

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
JAWA BARAT
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWAKARTA

Tgl. Cetak 18/05/2022 2:08 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	39,600,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	130,471,793	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	23,529,968	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	730,500	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	9,149,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	177,152,589	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	174,005,663	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	98,105,500	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	13,600,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	313,446,874	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	174,427,072	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	82,064,050	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	9,000	0
JUMLAH			48,845,558,199.63	48,845,558,199.63

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 0200 JAWA BARAT
SATUAN KERJA : 506208 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWAKARTA

Tgl. Cetak 18/05/2022 2:17 AM
lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115612	Piutang dari KPPN	83,787,580	0
0.0	219711	Utang Kepada KUN	0	1,315,976,238
2.0	425782	Estimasi Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I Yang Dialokasikan	11,119,000,000	0
2.0	425784	Estimasi Pendapatan Bea Lelang Pegadaian Yang Dialokasikan	1,242,000,000	0
2.0	425785	Estimasi Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara Yang Dialokasikan	11,815,000	0
2.0	521111	Allotment Belanja Keperluan Perkantoran	0	612,380,000
2.0	521114	Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	16,000,000
2.0	521115	Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	169,440,000
2.0	521119	Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya	0	8,520,000
2.0	521131	Allotment Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	83,244,000
2.0	521211	Allotment Belanja Bahan	0	4,959,000
2.0	521219	Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	39,600,000
2.0	521811	Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	98,190,000
2.0	522111	Allotment Belanja Langganan Listrik	0	147,600,000
2.0	522112	Allotment Belanja Langganan Telepon	0	26,400,000
2.0	522113	Allotment Belanja Langganan Air	0	840,000
2.0	522192	Allotment Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	14,070,000
2.0	523111	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	194,270,000
2.0	523121	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	174,690,000
2.0	524111	Allotment Belanja Perjalanan Biasa	0	110,352,000
2.0	524113	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	17,500,000
2.0	532111	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	39,424,000
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	64,004,999
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	5,235,000
3.0	425282	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Standardisasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0	0
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	80,752,385
3.0	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	8,943,394,543
3.1	425782	Pengembalian Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	800,000	0
3.0	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	1,955,724,740
3.0	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	7,590,195
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	936,900
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	607,600,350	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	14,614,400	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	165,822,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	8,400,000	0
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	71,139,448	0
3.0	521211	Belanja Bahan	4,663,000	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2021
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015	KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : 09	DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 0200	JAWA BARAT
SATUAN KERJA : 506208	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWAKARTA

Tgl. Cetak 18/05/2022 2:17 AM
lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	39,600,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	79,855,400	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	145,015,670	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	24,756,400	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	788,000	0
3.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	9,149,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	177,152,589	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	174,005,663	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	98,105,500	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13,600,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39,424,000	0
JUMLAH			14,131,094,000	14,131,094,000

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2021 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015	KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : 09	DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 0200	JAWA BARAT
SATUAN KERJA : 506208	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWAKARTA

Tgl. Cetak 18/05/2022 2:19 AM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker --rekon17

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	600,000	0
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	82,613,601.63	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	17,213,202	0
0.0	131111	Tanah	20,819,298,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	5,126,331,863	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	7,604,879,500	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	4,232,154,199
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	580,888,247
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	958,146,188	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	944,223,588
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	16,963,809
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	82,613,601.63
0.0	391111	Ekuitas	0	28,752,238,910
JUMLAH			34,609,082,354.63	34,609,082,354.63

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 0200 JAWA BARAT
SATUAN KERJA : 506208 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWAKARTA

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 18/05/22 2:20 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	64,004,999	0	64,004,999	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	5,235,000	0	5,235,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	69,239,999	0	69,239,999	
4256	Pendapatan Jasa Lainnya					
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	80,752,385	0	80,752,385	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4256	0	80,752,385	0	80,752,385	
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan					
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	11,119,000,000	8,943,394,543	800,000	8,942,594,543	80.43
425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	1,242,000,000	1,955,724,740	0	1,955,724,740	157.47
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	11,815,000	7,590,195	0	7,590,195	64.24
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	12,372,815,000	10,906,709,478	800,000	10,905,909,478	88.14
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	936,900	0	936,900	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	936,900	0	936,900	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	12,372,815,000	11,057,638,762	800,000	11,056,838,762	89.36
	JUMLAH PENDAPATAN	12,372,815,000	11,057,638,762	800,000	11,056,838,762	89.36

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
 ESELON I : 09
 WILAYAH/PROVINSI : 008
 SATUAN KERJA : 506208
 JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
 Kanwil DJKN Jabar
 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWAKARTA

Kode Lap : LRA.B.S.
 Tanggal : 18/05/22 2:19 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun --
 Tgl Data : 20/5/19 12:00 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	617,380,000	612,380,000	607,600,350	0	607,600,350	99.22	4,779,650
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	35,000,000	16,000,000	14,614,400	0	14,614,400	91.34	1,385,600
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	169,440,000	169,440,000	165,822,000	0	165,822,000	97.86	3,618,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	44,520,000	8,520,000	8,400,000	0	8,400,000	98.59	120,000
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi	46,524,000	83,244,000	71,139,448	0	71,139,448	85.46	12,104,552
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	912,864,000	889,584,000	867,576,198	0	867,576,198	97.53	22,007,802
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	26,133,000	4,959,000	4,663,000	0	4,663,000	94.03	296,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	6,000,000	39,600,000	39,600,000	0	39,600,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	32,133,000	44,559,000	44,263,000	0	44,263,000	99.34	296,000
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	105,077,000	98,190,000	79,855,400	0	79,855,400	81.33	18,334,600
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	105,077,000	98,190,000	79,855,400	0	79,855,400	81.33	18,334,600
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	168,000,000	147,600,000	145,015,670	0	145,015,670	98.25	2,584,330
522112	Belanja Langganan Telepon	12,000,000	26,400,000	24,756,400	0	24,756,400	93.77	1,643,600
522113	Belanja Langganan Air	3,600,000	840,000	788,000	0	788,000	93.81	52,000
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	59,400,000	14,070,000	9,149,000	0	9,149,000	65.02	4,921,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	243,000,000	188,910,000	179,709,070	0	179,709,070	95.13	9,200,930
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	205,270,000	194,270,000	177,152,589	0	177,152,589	91.19	17,117,411
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	229,090,000	174,690,000	174,005,663	0	174,005,663	99.61	684,337
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	434,360,000	368,960,000	351,158,252	0	351,158,252	95.18	17,801,748
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	189,488,000	110,352,000	98,105,500	0	98,105,500	88.9	12,246,500
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	48,996,000	17,500,000	13,600,000	0	13,600,000	77.71	3,900,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	238,484,000	127,852,000	111,705,500	0	111,705,500	87.37	16,146,500
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,965,918,000	1,718,055,000	1,634,267,420	0	1,634,267,420	95.12	83,787,580
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56,517,000	39,424,000	39,424,000	0	39,424,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	56,517,000	39,424,000	39,424,000	0	39,424,000	100	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 008
SATUAN KERJA : 506208
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Kanwil DJKN Jabar
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWAKARTA

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 18/05/22 2:19 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun --
Tgl Data : 20/5/19 12:00 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	56,517,000	39,424,000	39,424,000	0	39,424,000	100	0
	JUMLAH BELANJA	2,022,435,000	1,757,479,000	1,673,691,420	0	1,673,691,420	95.23	83,787,580

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN	: 015	KEMENTERIAN KEUANGAN	
ESELON I	: 09	DITJEN KEKAYAAN NEGARA	Kode Lap : LO.SAT
WILAYAH/PROVINSI	: 008	KANWIL VIII DJKN BANDUNG	Tanggal : 18/05/22 2:18 AM
SATUAN KERJA	: 506208	KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG	Halaman : 1
JENIS SATUAN KERJA	: KD	PURWAKARTA	Prg ID : lap_lo_satker --
			Tgl Data : 20/05/19 12:00 AM

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	11,025,232,636	8,167,423,585	2,857,809,051	34.99
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	11,025,232,636	8,167,423,585	2,857,809,051	34.99
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	11,025,232,636	8,167,423,585	2,857,809,051	34.99
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	1,231,144,805	(1,231,144,805)	(100)
Beban Persediaan	82,064,050	141,852,858	(59,788,808)	(42.148)
Beban Barang dan Jasa	1,074,584,459	1,054,964,988	19,619,471	1.86
Beban Pemeliharaan	351,158,252	397,013,911	(45,855,659)	(11.55)
Beban Perjalanan Dinas	111,705,500	137,597,600	(25,892,100)	(18.817)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : 0200 JAWA BARAT
JENIS SATUAN KERJA : KD
SATUAN KERJA : 506208 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWAKARTA

Kode Lap : LPE.SATKER
Tanggal : 18/05/22 2:18 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lpe_satker --rekon17

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	28,752,238,910	28,602,498,060	149,740,850	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	8,982,788,328	4,713,723,367	4,269,064,961	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	(27,532,450)	27,532,450	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	(33,180,000)	33,180,000	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	5,647,550	(5,647,550)	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(9,383,147,342)	(4,536,450,067)	(4,846,697,275)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(400,359,014)	149,740,850	(550,099,864)	-
EKUITAS AKHIR	28,351,879,896	28,752,238,910	(400,359,014)	-

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 008
SATUAN KERJA : 506208
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
KANWIL VIII DJKN BANDUNG
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PURWAKARTA

Kode Lap : LO.SAT
Tanggal : 18/05/22 2:18 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lo_satker --
Tgl Data : 20/05/19 12:00 AM

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	487,873,946	490,317,880	(2,443,934)	(0.498)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	2,107,386,207	3,452,892,042	(1,345,505,835)	(38.968)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	8,917,846,429	4,714,531,543	4,203,314,886	89.157
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	64,004,999	(925,690)	64,930,689	(7,014.302)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	64,004,999	0	64,004,999	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	925,690	(925,690)	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	936,900	117,514	819,386	697.267
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	945,900	117,514	828,386	704.925
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	9,000	0	9,000	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	64,941,899	(808,176)	65,750,075	(8,135.613)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	8,982,788,328	4,713,723,367	4,269,064,961	90.567
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	8,982,788,328	4,713,723,367	4,269,064,961	90.567

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 015

KEMENTERIAN KEUANGAN

SATUAN KERJA

: 506208

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWAKARTA

Kode Lap : LRA.B.S.

Tanggal : 18/05/22 2:24 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_satker --

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
52	BELANJA BARANG							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	617,380,000	612,380,000	607,600,350	0	607,600,350	99.22	4,779,650
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	35,000,000	16,000,000	14,614,400	0	14,614,400	91.34	1,385,600
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	169,440,000	169,440,000	165,822,000	0	165,822,000	97.86	3,618,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	44,520,000	8,520,000	8,400,000	0	8,400,000	98.59	120,000
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	46,524,000	83,244,000	71,139,448	0	71,139,448	85.46	12,104,552
521211	Belanja Bahan	26,133,000	4,959,000	4,663,000	0	4,663,000	94.03	296,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	6,000,000	39,600,000	39,600,000	0	39,600,000	100	0
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	105,077,000	98,190,000	79,855,400	0	79,855,400	81.33	18,334,600
522111	Belanja Langganan Listrik	168,000,000	147,600,000	145,015,670	0	145,015,670	98.25	2,584,330
522112	Belanja Langganan Telepon	12,000,000	26,400,000	24,756,400	0	24,756,400	93.77	1,643,600
522113	Belanja Langganan Air	3,600,000	840,000	788,000	0	788,000	93.81	52,000
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	59,400,000	14,070,000	9,149,000	0	9,149,000	65.02	4,921,000
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	205,270,000	194,270,000	177,152,589	0	177,152,589	91.19	17,117,411
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	229,090,000	174,690,000	174,005,663	0	174,005,663	99.61	684,337
524111	Belanja Perjalanan Biasa	189,488,000	110,352,000	98,105,500	0	98,105,500	88.9	12,246,500
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	48,996,000	17,500,000	13,600,000	0	13,600,000	77.71	3,900,000
	JUMLAH BELANJA BARANG	1,965,918,000	1,718,055,000	1,634,267,420	0	1,634,267,420	95.12	83,787,580
53	BELANJA MODAL							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56,517,000	39,424,000	39,424,000	0	39,424,000	100	0
	JUMLAH BELANJA MODAL	56,517,000	39,424,000	39,424,000	0	39,424,000	100	0
	JUMLAH RUPIAH MURNI	2,022,435,000	1,757,479,000	1,673,691,420	0	1,673,691,420	95.23	83,787,580
	TOTAL	2,022,435,000	1,757,479,000	1,673,691,420	0	1,673,691,420	95.23	83,787,580

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 008
SATUAN KERJA : 506208
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Kanwil DJKN Jabar
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWAKARTA

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 18/05/22 2:23 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_sgo --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01 4700 EAG 52 5212 521211 521219	RUPIAH MURNI Legislasi dan Litigasi Layanan Hukum BELANJA BARANG Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan Belanja Barang Non Operasional Lainnya	 2,142,000 6,000,000	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0	 0 0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	8,142,000	0	0	0	0		0
5241 524111 524113	Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	 14,256,000 4,800,000	 7,992,000 1,300,000	 7,604,500 900,000	 0 0	 7,604,500 900,000	 95.15 69.23	 387,500 400,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	19,056,000	9,292,000	8,504,500	0	8,504,500	91.52	787,500
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	27,198,000	9,292,000	8,504,500	0	8,504,500	91.52	787,500
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4700.EAG	27,198,000	9,292,000	8,504,500	0	8,504,500	91.525	787,500
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4700	27,198,000	9,292,000	8,504,500	0	8,504,500	91.52	787,500
4701 EAC 52 5211 521111 521114 521115 521119 521131	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Layanan Umum BELANJA BARANG Belanja Barang Operasional Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja Honor Operasional Satuan Kerja Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi	 617,380,000 35,000,000 169,440,000 44,520,000 46,524,000	 612,380,000 16,000,000 169,440,000 8,520,000 83,244,000	 607,600,350 14,614,400 165,822,000 8,400,000 71,139,448	 0 0 0 0 0	 607,600,350 14,614,400 165,822,000 8,400,000 71,139,448	 99.22 91.34 97.86 98.59 85.46	 4,779,650 1,385,600 3,618,000 120,000 12,104,552
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	912,864,000	889,584,000	867,576,198	0	867,576,198	97.53	22,007,802
5212 521211	Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan	 8,548,000	 4,292,000	 4,128,000	 0	 4,128,000	 96.18	 164,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	8,548,000	4,292,000	4,128,000	0	4,128,000	96.18	164,000
5218 521811	Belanja Barang Persediaan Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	 105,077,000	 98,190,000	 79,855,400	 0	 79,855,400	 81.33	 18,334,600
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	105,077,000	98,190,000	79,855,400	0	79,855,400	81.33	18,334,600
5221 522111	Belanja Jasa Belanja Langganan Listrik	 168,000,000	 147,600,000	 145,015,670	 0	 145,015,670	 98.25	 2,584,330

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 008
SATUAN KERJA : 506208
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Kanwil DJKN Jabar
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWAKARTA

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 18/05/22 2:23 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_sgo --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
522112	Belanja Langganan Telepon	12,000,000	26,400,000	24,756,400	0	24,756,400	93.77	1,643,600
522113	Belanja Langganan Air	3,600,000	840,000	788,000	0	788,000	93.81	52,000
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	59,400,000	14,070,000	9,149,000	0	9,149,000	65.02	4,921,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	243,000,000	188,910,000	179,709,070	0	179,709,070	95.13	9,200,930
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	61,056,000	25,200,000	22,623,000	0	22,623,000	89.77	2,577,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,800,000	2,800,000	900,000	0	900,000	32.14	1,900,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	65,856,000	28,000,000	23,523,000	0	23,523,000	84.01	4,477,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,335,345,000	1,208,976,000	1,154,791,668	0	1,154,791,668	95.52	54,184,332
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4701.EAC	1,335,345,000	1,208,976,000	1,154,791,668	0	1,154,791,668	95.518	54,184,332
EAD 52	Layanan Sarana Internal BELANJA BARANG							
5231	Belanja Pemeliharaan							
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	229,090,000	174,690,000	174,005,663	0	174,005,663	99.61	684,337
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	229,090,000	174,690,000	174,005,663	0	174,005,663	99.61	684,337
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	229,090,000	174,690,000	174,005,663	0	174,005,663	99.61	684,337
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56,517,000	39,424,000	39,424,000	0	39,424,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	56,517,000	39,424,000	39,424,000	0	39,424,000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	56,517,000	39,424,000	39,424,000	0	39,424,000	100	0
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4701.EAD	285,607,000	214,114,000	213,429,663	0	213,429,663	99.68	684,337
EAE 52	Layanan Prasarana Internal BELANJA BARANG							
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	205,270,000	194,270,000	177,152,589	0	177,152,589	91.19	17,117,411
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	205,270,000	194,270,000	177,152,589	0	177,152,589	91.19	17,117,411
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	205,270,000	194,270,000	177,152,589	0	177,152,589	91.19	17,117,411
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4701.EAE	205,270,000	194,270,000	177,152,589	0	177,152,589	91.189	17,117,411
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4701	1,826,222,000	1,617,360,000	1,545,373,920	0	1,545,373,920	95.55	71,986,080
4702 BMB	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik Komunikasi Publik							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 008
SATUAN KERJA : 506208
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Kanwil DJKN Jabar
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWAKARTA

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 18/05/22 2:23 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_sgo --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	4,080,000	3,060,000	2,040,000	0	2,040,000	66.67	1,020,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,200,000	800,000	200,000	0	200,000	25	600,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	5,280,000	3,860,000	2,240,000	0	2,240,000	58.03	1,620,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	5,280,000	3,860,000	2,240,000	0	2,240,000	58.03	1,620,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4702.BMB	5,280,000	3,860,000	2,240,000	0	2,240,000	58.031	1,620,000
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4702	5,280,000	3,860,000	2,240,000	0	2,240,000	58.03	1,620,000
4704	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan							
EAK	Layanan Pengawasan Internal							
52	BELANJA BARANG							
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	10,560,000	1,700,000	1,360,000	0	1,360,000	80	340,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,200,000	300,000	200,000	0	200,000	66.67	100,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	11,760,000	2,000,000	1,560,000	0	1,560,000	78	440,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	11,760,000	2,000,000	1,560,000	0	1,560,000	78	440,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4704.EAK	11,760,000	2,000,000	1,560,000	0	1,560,000	78	440,000
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4704	11,760,000	2,000,000	1,560,000	0	1,560,000	78	440,000
4796	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi							
BMB	Komunikasi Publik							
52	BELANJA BARANG							
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	23,040,000	5,160,000	3,584,000	0	3,584,000	69.46	1,576,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,400,000	400,000	200,000	0	200,000	50	200,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	26,440,000	5,560,000	3,784,000	0	3,784,000	68.06	1,776,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	26,440,000	5,560,000	3,784,000	0	3,784,000	68.06	1,776,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4796.BMB	26,440,000	5,560,000	3,784,000	0	3,784,000	68.058	1,776,000
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4796	26,440,000	5,560,000	3,784,000	0	3,784,000	68.06	1,776,000
4797	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko							
FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan							
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 008
SATUAN KERJA : 506208
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Kanwil DJKN Jabar
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWAKARTA

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 18/05/22 2:23 AM
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_bel_sgo --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521211	Belanja Bahan	10,360,000	109,000	0	0	0	0	109,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	10,360,000	109,000	0	0	0	0	109,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	10,360,000	109,000	0	0	0	0	109,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4797.FAE	10,360,000	109,000	0	0	0	0	109,000
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4797	10,360,000	109,000	0	0	0	0	109,000
4798 AAH 52 5212 521211	Pengelolaan Aset Peraturan lainnya BELANJA BARANG Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan							
		3,758,000	558,000	535,000	0	535,000	95.88	23,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	3,758,000	558,000	535,000	0	535,000	95.88	23,000
5241 524111 524113	Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota							
		37,280,000	47,800,000	42,936,000	0	42,936,000	89.82	4,864,000
		11,800,000	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	49,080,000	53,800,000	48,936,000	0	48,936,000	90.96	4,864,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	52,838,000	54,358,000	49,471,000	0	49,471,000	91.01	4,887,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4798.AAH	52,838,000	54,358,000	49,471,000	0	49,471,000	91.01	4,887,000
FAE 52 5212 521211	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan BELANJA BARANG Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan							
		1,325,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,325,000	0	0	0	0		0
5241 524111 524113	Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota							
		39,216,000	12,360,000	11,928,000	0	11,928,000	96.5	432,000
		21,796,000	5,900,000	5,200,000	0	5,200,000	88.14	700,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	61,012,000	18,260,000	17,128,000	0	17,128,000	93.8	1,132,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	62,337,000	18,260,000	17,128,000	0	17,128,000	93.8	1,132,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4798.FAE	62,337,000	18,260,000	17,128,000	0	17,128,000	93.801	1,132,000
FAK 52 5212 521219	Pengelolaan Aset BUN BELANJA BARANG Belanja Barang Non Operasional Belanja Barang Non Operasional Lainnya							
		0	39,600,000	39,600,000	0	39,600,000	100	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 008
SATUAN KERJA : 506208
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Kanwil DJKN Jabar
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWAKARTA

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 18/05/22 2:23 AM
Halaman : 5
Prg ID : lap_lra_bel_sgo --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	0	39,600,000	39,600,000	0	39,600,000	100	0
5241 524111	Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Biasa	0	7,080,000	6,030,000	0	6,030,000	85.17	1,050,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	0	7,080,000	6,030,000	0	6,030,000	85.17	1,050,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	0	46,680,000	45,630,000	0	45,630,000	97.75	1,050,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 4798.FAK	0	46,680,000	45,630,000	0	45,630,000	97.751	1,050,000
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN4798	115,175,000	119,298,000	112,229,000	0	112,229,000	94.07	7,069,000
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01	2,022,435,000	1,757,479,000	1,673,691,420	0	1,673,691,420	95.23	83,787,580
	JUMLAH BELANJA	2,022,435,000	1,757,479,000	1,673,691,420	0	1,673,691,420	95.23	83,787,580

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2021

Per Program; Kegiatan;
Periode Desember 2021

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Satuan Kerja : 506208 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWAKARTA

Hal 1 dari 1

Uraian	Pagu Revisi	Realisasi TA 2021				SISA ANGGARAN
		Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	1,757,479,000	1,552,321,885	121,369,535	1,673,691,420	95.23 %	83,787,580
CD Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	124,967,000	88,922,500	27,090,500	116,013,000	92.83 %	8,954,000
CD.4796 Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	5,560,000	2,333,500	1,450,500	3,784,000	68.06 %	1,776,000
CD.4797 Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	109,000	0	0	0	0.00 %	109,000
CD.4798 Pengelolaan Aset	119,298,000	86,589,000	25,640,000	112,229,000	94.07 %	7,069,000
WA Program Dukungan Manajemen	1,632,512,000	1,463,399,385	94,279,035	1,557,678,420	95.42 %	74,833,580
WA.4700 Legislasi dan Litigasi	9,292,000	8,097,500	407,000	8,504,500	91.52 %	787,500
WA.4701 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	1,617,360,000	1,451,501,885	93,872,035	1,545,373,920	95.55 %	71,986,080
WA.4702 Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	3,860,000	2,240,000	0	2,240,000	58.03 %	1,620,000
WA.4704 Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	2,000,000	1,560,000	0	1,560,000	78.00 %	440,000



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
PROVINSI JAWA BARAT
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PURWAKARTA**

JALAN SILIWANGI NO. 9 PURWAKARTA 41111; TELEPON: (0264) 8304884, 8227888; FAKSIMILE: (0264) 8225765;
SITUS: www.djkn.kemenkeu.go.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor :PYT- 01 /KNL.0804/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Nama | : Wahjudi Prajogo |
| 2. Jabatan | : Kuasa Pengguna Anggaran |
| 3. Satuan Kerja | : KPKNL Purwakarta |
| 4. Eselon I | : Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| 5. Kementerian Negara/ Lembaga | : Kementerian Keuangan Republik Indonesia |

dengan ini menyatakan bahwa seluruh perubahan data dan koreksi dalam Laporan Keuangan Satuan Kerja yang diunggah telah dikomunikasikan dan disetujui oleh Tim Internal Penelaahan Laporan Keuangan KPKNL Purwakarta bersama Bagian Keuangan.Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Segala akibat dari pengunggahan perubahan atau koreksi data transaksi keuangan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Kuasa Pengguna Anggaran.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Purwakarta, 13 Mei 2022
Kuasa Pengguna Anggaran

Wahjudi Prajogo





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA BARAT
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWAKARTA

Jalan Siliwangi No. 9 Purwakarta
Telp (0264) 8304884, (0264) 8227888 – Faks (0264) 8225765
E-mail : kpknlpurwakarta@kemenkeu.go.id